

## RELASI GEREJA DAN POLITIK (Tinjauan Etika Kristen)

Hubungan antara Gereja (agama) dan Politik merupakan hal yang sangat penting dibicarakan baik dalam lingkup akademis maupun dalam lingkup masyarakat pada umumnya. Hubungan itu berbeda dari waktu ke waktu seiring dengan hubungan antara keduanya menimbulkan polemik. Hal ini disebabkan karena masih adanya pemahaman bahwa bidang pelayanan gereja harus dibatasi kegiatannya pada urusan-urusan teologi. Pada pihak lain, ada pihak yang berpandangan bahwa kegiatan gereja tidak dapat dipersempit hanya pada urusan-urusan yang abstrak/teologi. Gereja justru harus memperlihatkan keperihatinannya pada persoalan-persoalan sosial yang sangat konkret, misalnya persoalan-persoalan politik. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan mengenai hubungan “Gereja dan Politik” ada baiknya terlebih dahulu kita memahami apa itu gereja dan politik.

### Pengertian Gereja

Istilah Gereja berasal dari bahasa portugis *igreja* dan melalui bahasa latin *ecclesia*, yang keduanya berasal dari bahasa Yunani *ekklesia*. Kata inilah yang kita jumpai dalam Perjanjian Baru; misalnya diterjemahkan dengan kata *jemaat* (dahulu diterjemahkan dengan kata “sidang” ataupun “sidang jemaat”); jemaat dari segala tempat dan segala abad, persekutuan segala orang percaya; sering juga disebut gereja yang tidak kelihatan (Mat. 16:18); jemaat di suatu kota (Kis 5:11); jemaat yang berkumpul di sebuah rumah (Rm 16:5).<sup>1</sup> Di dunia Yunani kata “ekklesia” (dari kata kerja “*Kaleo*”) mula-mula berarti: mereka yang dipanggil keluar, yaitu orang-orang merdeka yang oleh seorang bentara dipanggil berhimpun untuk menghadiri rapat rakyat. Jadi dapat dikatakan bahwa Gereja terdapat di mana ada yang dipanggil, mereka dipanggil untuk berhimpun, yaitu oleh Allah.<sup>2</sup> Istilah ekklesia tidak saja harus diterangkan dengan kata “dipanggil”, tetapi malah dengan “dipanggil ke luar”. Sebagaimana Abraham telah dipanggil ke luar dari dunia kafir (Kej 12:1), demikian pulalah gereja dipanggil dari dunia bangsa-bangsa, “keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib (1 Ptr 2:9; Kol 1:13). Gereja adalah suatu persekutuan orang-orang yang menyadari, bahwa mereka adalah “orang-orang asing” di bumi ini (Ibr 11:8-16; Mzm 119:19).<sup>3</sup>

Lebih lanjut menurut Boland dan Niftrik, untuk memahami apa artinya Gereja, ada baiknya juga memerhatikan kata-kata untuk “Gereja” dalam beberapa bahasa barat, misalnya kata Inggris “Church”, kata Belanda “Kerk” dan kata Jerman “Kirche”. Agaknya kata-kata itu berasal dari kata Yunani *kyriake*. Kata sifat ini dipakai untuk apa yang tergolong kepada Kyrios, apa yang menjadi milik Kyrios. Itulah Gereja yakni orang-orang yang mengaku menjadi milik Yesus Kristus. Jika Gereja bukanlah *Gereja Kristus*, ia sama sekali tidak dapat disebut Gereja.<sup>4</sup>

Menurut Eka Darmaputra baik secara etimologis maupun semantik, Gereja adalah orang-orangnya. Sebagaimana dikatakan dengan tepatnya oleh Martin Luther bahwa Gereja

---

<sup>1</sup> R. Soedarmo, Kamus Istilah Teologi, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002, hlm, 30.

<sup>2</sup> G.C. Van Niftrik dan B.J. Boland, Dogmatika Masa Kini, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001, hlm, 359.

<sup>3</sup> *Ibi.*, hlm, 360.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm, 361.

adalah sebuah kongregasi, sebuah *assembly*, sebuah komunitas. Pendek kata Gereja adalah sebuah persekutuan. Persekutuan di dalam Kristus. Persekutuan dengan Kristus.<sup>5</sup>

### Pengertian Politik

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani yakni *polis* yang berarti kota atau suatu komunitas. Istilah lain dalam bahasa Yunani ialah *politeia* yang berarti warga Negara, Negara, kesejahteraan atau *way of life*. Jadi politik pada mulanya berarti suatu masyarakat yang berdiam di suatu kota.<sup>6</sup>

Dalam mendefinisikan mengenai politik Oscar Cullman, yang dikutip oleh Gunche Lugo, membedakan antara *politeia* dan *politeuma*. *Politeia* berarti politik dalam arti merebut kekuasaan atau kedudukan dalam pemerintahan. Sedangkan *politeuma* adalah politik yang menekankan tegaknya nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini misalnya: keadilan, kebenaran, kesejahteraan dan mewujudkan peradaban baru yang mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26-28).<sup>7</sup>

Aristoteles (384-322 S.M) merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik (*zoon politikon*). Dengan itu ia ingin menjelaskan, hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat hal ini sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindarkan oleh manusia dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya daripada bekerjasama dengan orang lain. Manakala manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadinya melalui sumber yang tersedia, dan ketika mereka berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka akan melihat dirinya sibuk dengan kegiatan politik.<sup>8</sup> Dengan demikian menurut Aristoteles setiap orang adalah politisi, cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan yang tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, suatu kerangka yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif.

Secara teori, definisi politik terus berkembang sesuai dengan perspektif dan kajian para pakar, misalnya: politik dipersepsi sebagai kekuasaan Negara, perilaku elit politik, sistem, budaya, pembangunan, konflik antar kelas dalam masyarakat, ekonomi, kelompok termarjinal dan seterusnya. Dalam teori politik modern, politik diasumsikan sebagai kekuasaan Negara, yang diwakili oleh partai politik untuk mewakili aspirasi masyarakat, khususnya dalam konteks Negara demokrasi. Dengan demikian dalam konteks Negara demokrasi, politik didefinisikan sebagai kekuasaan menduduki parlemen atau pemerintahan. Dengan demikian politik identik dengan kekuasaan.<sup>9</sup> Dalam konteks itu politik berkaitan dengan dua hal: *Machvarning* yaitu

---

<sup>5</sup> Martin L. Sinaga (peny), Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia, Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputra, Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm, 409.

<sup>6</sup> Gunche Lugo, Manifesto Politik Yesus, Yogyakarta: Andi, 2009, hlm, 42.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 44.

<sup>8</sup> Carlton Clymer Rodee dkk (ed), Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm, 2.

<sup>9</sup> Gunche Lugo, *op.cit*, hlm, 42.

upaya untuk memperoleh dan membentuk kekuasaan; *Machtsanwending* yaitu upaya untuk menggunakan kekuasaan.

Antara abad keenam belas sampai awal abad kedua puluh, politik diartikan lebih sempit dibandingkan dengan pengertian yang dipahami orang-orang Yunani. Jean Bodin (1530-1596), seorang filosof politik Prancis, memperkenalkan istilah “ilmu politik” (*science politique*). Definisi tentang politik, juga diungkapkan oleh Montesquieu (1687-1755), yang mengemukakan bahwa semua fungsi pemerintahan dapat dimasukkan ke dalam kategori legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>10</sup> Berdasarkan perspektif ini, bisa dipahami bahwa para ahli ilmu politik akan memusatkan perhatian, semata-mata sampai sekarang ini, pada organisasi dan sistem kerja lembaga-lembaga yang membuat undang-undang, yang melaksanakannya, dan yang menampung pertentangan yang timbul dari kepentingan yang berbeda dan bermacam-macam penafsiran tentang undang-undang.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemahaman mengenai politik dikalangan sebagian para ahli ilmu politik sejak ahun 1950-an mengalami pergeseran yang cukup signifikan bahkan para ilmuwan politik kontemporer sekarang ini cenderung kembali pada pemahaman politik orang-orang Yunani. Mereka berpendapat bahwa politik bukan hanya menyangkut lembaga-lembaga Negara yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif, tetapi politik sebenarnya merupakan proses kompleks yang melibatkan sikap warga Negara, kepentingan, kelompok organisasi, kegiatan pemilihan umum, lobbying, perumusan, penerapan dan penafsiran undang-undang. Inilah yang disebut sebagai “sistem politik”.

Menurut Emanuel Gerrit Singgih politik adalah seni yang bersangkutan-paut dengan proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang berbeda kepentingannya, di mana pengambilan keputusan ini menyangkut masa depan orang banyak. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, dibutuhkan kaidah-kaidah moral yang disebut sebagai etika politik.<sup>11</sup>

### Hubungan Gereja dan Negara

Hubungan antara Gereja dan Negara merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam sejarah partisipasi Gereja dalam politik, bahkan menurut Andreas A. Yewangoe hubungan antara Gereja dan Negara bukanlah sesuatu yang gampang untuk dirumuskan. Sejarah sudah memperlihatkan kepada kita, bahwa, bukan tidak jarang perlombaan untuk saling mendominasi satu terhadap yang lainnya. Dalam kasus Gereja-Negara, Negara mendominasi Gereja, sehingga segala sesuatu yang berlaku di dalam Gereja ditentukan oleh Negara. Sejak Konstantin Agung (4 M) menjadi Kristen, kecenderungan Negara untuk ikut menentukan apa yang baik dan tidak baik. Di Indonesia khususnya pada zaman kolonial, kita juga menghadapi kasus yang serupa. Pemerintah kolonial Belanda antara lain menempatkan apa yang disebutnya “Commisarissen” di dalam majelis-majelis Jemaat ‘De Indische Kerk’, yang pada waktu itu merupakan Gereja-Negara, yang berfungsi sebagai yang mewakili kepentingan-kepentingan Negara.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Carlton Clymer Rodee dkk (ed), *op.cit*, hlm, 3.

<sup>11</sup> Emanuel Gerrit Singgih, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm, 27.

<sup>12</sup> Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996, hlm, 23.

Menurut Donald Jay Losher, secara umum pandangan mengenai hubungan antara Gereja dan Negara dibagi menjadi tiga kategori yaitu pemisahan ketat, asimilasi dan interaksi. Pemisahan ketat tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Negara, karena kaum kristen memilih sendiri untuk tidak berperan di bidang politik atau sosial. Asimilasi juga tidak mampu karena kaum beragama telah dikuasai oleh pemerintah dan ideologinya, sehingga hanya mampu menerima segala kebijakan secara pasif. Baik asimilasi maupun pemisahan ketat tidak mampu memegang peranan aktif dalam perubahan sosial dan politik. Sikap interaksilah yang mampu bertahan lama dalam periode kontemporer, karena transformasi dan pembebasan memegang peranan jauh lebih aktif dan positif, meskipun juga dengan resiko yang lebih besar namun memegang peranan paling aktif, kritikal dan positif terhadap Negara dan masyarakat.<sup>13</sup>

Berbeda dengan Zakaria J. Ngelow yang membaginya ke dalam 5 model yakni: kesatuan Gereja dengan Negara, yang memberi Gereja kuasa atas Negara. Yang disebut *ecclesiocracy*; kesatuan Gereja dengan Negara, yang memberi Negara kuasa atas Gereja. Yang disebut *erastianism*; suatu kesatuan denominasi gereja tertentu dengan Negara. Yang disebut sebagai *The Establishment Principle*; suatu pengakuan resmi atas otoritas pemerintahan Yesus Kristus dan Firman-Nya oleh Negara. Yang disebut sebagai *National confessionalism*; dan pemisahan penuh antara Gereja dan Negara dalam segala hal. Yang disebut sebagai *secularism*.<sup>14</sup>

Relasi Gereja dan Negara dalam Perjanjian Baru mengekspresikan politik sebagai sesuatu wilayah tertentu (*provisional*) yang terpisah dari kehidupan Gereja ada kecenderungan untuk berfokus pada ritual agama yang menyangkal perbuatan daging dan hal-hal yang bersifat sekuler. Umat menganggap bahwa urusan politik adalah urusan sekuler dan harus di jauhi. Hal ini tampak dengan adanya komunitas esene yang tinggal di gua Qumran pada abad pertama. Mereka menantikan datangnya Mesias yang mampu membebaskan dari hegemoni Roma.<sup>15</sup> Sikap seperti ini dapat dikategorikan dalam model pemisahan ketat atau secularism.

Menurut Calvin sebagaimana yang dikutip oleh Andreas A. Yewangoe, mengenai hal tersebut bahwa hubungan Gereja dengan Negara merupakan dua lingkaran yang pusatnya adalah Yesus Kristus. Jadi baik negara maupun gereja berpusatkan satu pusat saja yaitu Yesus Kristus. Dengan kata-kata lain, baik pelayanan gereja maupun pelayanan negara bersumber dari sumber yang satu yaitu Yesus Kristus. Hanya memang lingkup pelayanan mereka berbeda. Yang satu mungkin lebih terbatas, sedangkan yang lainnya lebih "luas". Marthin Luther pada pihak lain berbicara mengenai dua kerajaan yang terpisah, namun terdapat juga titik-titik singgung di antara keduanya. Bagaimana menempatkan secara persis titik-titik singgung itu, tentu dibutuhkan pemahaman mendalam dan kepekaan luar biasa menyiasati apa yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Dari uraian di atas kelompok kami menyimpulkan bahwa Gereja dan Negara memiliki tanggung jawab yang sama yakni untuk mensejahterakan rakyat (umat). Keduanya tidak saling mengintervensi. Negara menjamin kebebasan bagi warga gereja untuk menjalankan ibadahnya

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm, 105.

<sup>14</sup> Zakaria J. Ngelow, Pengalaman Kristen dalam hubungan agama dan Negara, Pointers pada seminar Gereja, Negara dan Isu-Isu Agama, download, 15 Juni 2015

<sup>15</sup> Gunche Lugo, Op.cit, hlm, 65.

<sup>16</sup> Andreas A. Yewangoe, Agama dan Negara: Sebuah Hubungan Yang Tidak mudah, Disampaikan Dalam Kursus "Pendidikan Politik Angkatan III" di Palangkaraya, 20 Oktober 2008.

sesuai dengan keyakinannya, dan Gereja memiliki tanggung jawab untuk memberi kritikan bagi terselenggaranya kehidupan bernegara yang adil bagi semua orang.

### **Permasalahan Umat Kristen Dalam Kancah Politik**

Setelah di atas kita mencoba memahami apa itu gereja dan politik, serta relasi gereja dan politik, sekarang mari kita mencoba melihat realitas gereja dan politik yang terjadi di Indonesia.

Peranan umat Kristen dalam kancah politik adalah menjadi garam dan terang dunia (Matius 5 : 13-14). Di samping itu, gereja berperan sebagai salah satu institusi keagamaan yang mengawasi dan melestarikan sikap kritis jika suatu gereja itu hendak eksis sebagai pelayan yang menggarami dan menerangi dunia ini. Sehingga tidak ada alasan bagi gereja untuk membiarkan situasi bangsa dan negara menjadi *kasak-kusuk* tanpa memandang masa depan yang berarti dan menjanjikan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam realitas kehidupan cara gereja-gereja di Indonesia – walaupun tidak bisa di Universalkan - mengagama (beragama) dan menegara (bernegara) demikian bertolak belakang. Dimana masih banyak gereja-gereja di Indonesia yang demikian sibuk dengan kehidupan rohaninya saja dari berbagai dominasinya masing-masing. Sehingga identitas gereja yang menjadi garam dan terang bagi dunia hanya menjadi garam dan terang bagi komunitasnya saja. Hal ini disebabkan oleh paradigma yang menganggap bahwa Gereja dan Negara merupakan dua entitas yang terpisah sama sekali. Seakan-akan Gereja, atau agama pada umumnya merupakan wilayah yang privat dan sakral. Sementara Negara merupakan wilayah publik dan sekuler (duniawi). Paradigma ini masih banyak melekat dikalangan umat Kristiani, atau gereja jika kita meluaskannya. Kesan ini tak lepas dari kenyataan bahwa Gereja lazimnya mengurus persoalan-persoalan iman, sedangkan Negara biasanya mengurus kepentingan-kepentingan sosial pada umumnya.

Di sisi lain Permasalahan yang lebih kompleks antara relasi Gereja dan Negara (politik) adalah dalam tataran praktis, terutama dalam momen-momen politik seperti Pemilu legislatif maupun eksekutif, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Dalam praksis politik itu, batas relasi antara Gereja dan Negara sangat nihil. Dimana ada saja – bahkan mungkin banyak – para warga Gereja yang berlomba-lomba memanfaatkan persekutuan umat demi meraih kekuasaan politik (menjadi pejabat Negara). Sebaliknya, para politisi, dengan mengatas namakan nasional (Negara) mendatangi kantong-kantong masyarakat seperti Gereja.<sup>17</sup> Misalnya saja pada pemilihan presiden 2014 – 2019, PGPI (Persekutuan Gereja Pantekosta di Indonesia) mengeluarkan sebuah surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Pdt. Jacob Nahuway dimana isinya adalah mendukung Gerindra dan Prabowo untuk menjadi RI-1 lima tahun kedepan. Beliau pun mengeluarkan surat edaran ke seluruh gereja di bawah PGPI di Indonesia, yang jumlahnya kira-kira 12 juta jiwa. Beliau menyatakan dukungannya pada Gerindra dan

---

<sup>17</sup> Gusti A.B Menoh, Relasi Gereja dan Negara, Timor Express Harian Kupang, 6 Agustus 2014.

Prabowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia lima tahun ke depan dengan argument bahwa Presiden harus berlatar belakang militr/TNI, agar Indonesia tidak kacaun balau.<sup>18</sup>

Realitas hubungan Gereja dan Negara di Indonesia sedemikian tumpang tindih. Di satu sisi ada pemahaman yang menganggap politik itu adalah kotor dan duniawi sehingga Gereja tidak sepatasnya terjun dalam urusan politiknamun di lain sisi ada Gereja yang turun dalam perpolitikan dan justru memanfaatkan otoritas dan kekuasaan Gereja. Lalu timbulah pertanyaan bagaimanakah seharusnya Gereja berhubungan dengan politik? Dan bagaimanakah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Gereja? Prinsip-prinsip apakah yang harus dipegang Gereja?

### **Tanggapan Kristiani**

sesudah kita sekedar melihat fenomena perpolitikan di Indonesia dimana masih ada saja gereja yang sedemikian memisahkan diri dengan Negara (politik) dan hanya menyibukan diri dengan kehidupan rohani dan di sisi lain ada juga Gereja yang menyalahgunakan otoritasnya dalam perpolitikan, lalu timbul pertanyaan bagaimana seharusnya Gereja melihat kewajiban orang Kristen dalam Negara (politik)?

Untuk menemukan prinsip dasar sikap Kristiani tentang negara, kita dapat bertolak dari apa yang dikatakan Yesus sendiri : "Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah" (Mt. 22: 21). Apa yang mau dikatakan Yesus di sini? Tidak jarang kata Yesus ini diartikan seakan - akan Yesus bicara tentang perpisahan antara agama dan negara. Padahal masalah agama tidak disinggung di sini. Yang mau dikatakan Yesus adalah lain. Pertama Ia mengatakan : Berikan kepada Kaisar apa yang memang menjadi haknya. Dimana Kaisar sama dengan negara. Yesus mengaku bahwa negara mempunyai hak - hak dan para pengikut Yesus harus memenuhi hak - hak negara tersebut. Kiranya hal ini dapat juga diperluas. Yesus mau mengatakan bahwa di dunia adalah pelbagai pihak misalnya orang tua, atasan di tempat kerja, guru dan pemerintah. Semua mempunyai wewenang masing - masing (yang tidak diuraikan lebih lanjut oleh Yesus) dan manusia, termasuk para pengikut Yesus, wajib taat pada wewenang mereka itu.<sup>19</sup>

Dalam nada yang sama Rasul Paulus menegaskan, bahwa "tiap - tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak bersal dari Allah" (Roma 13:1). Begitu pula kita membaca dalam surat pertama Petrus, bahwa kita hendaknya tunduk pada lembaga manusia (1 Ptrs.2:13).

Karena itu Gereja menolak ajaran beberapa pihak Kristiani ekstrem bahwa orang Kristiani, karena dibimbing oleh Roh Kudus, tidak perlu taat kepada lembaga - lembaga manusia. Orang Kristen wajib tunduk kepada hukum dan wewenang negara.

Tetapi wejangan Yesus baru kita mengerti betul apabila kita juga memperhatikan juga kalimat yang kedua "Dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah!" Nah, Yesus tidak mengatakan bahwa disamping hak negara , Allah juga mempunyai satu dua hak. Melainkan

---

<sup>18</sup> <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/02/10/ketua-umum-gereja-pentakosta-capres-harus-berlatar-tni>

<sup>19</sup> Franz Magnis Suseno, Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk, Jakarta: Obor, 2004, hlm, 110.

agar kita hendaknya jangan lupa, bahwa hak (orang tua dan atasan) negara semua itu akhirnya adalah hak Allah. Karena (orang tua dan atasan) kaisar menerima wewenang mereka dari Allah. Segala kewajiban didunia hanya wajib sejauh sesuai dengan kewajiban paling dasar yang ada pada manusia : taat kepada ALLAH! Hal itu dirumuskan dengan paling jelas oleh Petrus dan para rasul lainnya pada waktu Mahkamah Agung Yahudi di Yerusalem mau melarang mereka jangan mengajar dalam nama Yesus : "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia" (Kis 5: 29). Maka kewajiban untuk taat kepada penguasa dunia apa pun bersyarat: kita wajib taat kepada Kaisar, tetapi apabila Kaisar memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hak Allah, kita harus menolak.<sup>20</sup>

Taat kepada hak Allah berarti apa? Adalah tugas Gereja untuk, dalam cahaya bimbingan Roh Kudus , membaca merenungi Injil/ Kitab Suci dan menjelaskan kehendak-kehendak Allah. Atau secara singkat : Allah menghendaki agar kita melakukan apa yang adil dan benar.

Sekarang kita dapat merumuskan dengan lebih persis sikap umat Kristiani terhadap Negara. Umat Kristiani selalu mengakui dan taat pada wewenang negara, umat Kristiani bersikap positif dan setia pada pemerintahnya, dan bahkan bahkan apabila ia dirugikan, ditekan atau ditindas ia tidak memberontak. Akan tetapi apabila negara memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran, umat Kristiani harus menolak. Dan memilih dirugikan dan bahkan bersedia mati, demi keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini kita berpegang pada sabda Yesus : "Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka akan menganiaya kamu ... kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku" (Yoh. 15: 19 ; 16: 2). Kesediaan untuk menjadi martir, untuk mati demi iman kita, termasuk panggilan kita sebagai orang Kristiani.<sup>21</sup>

### **III. Tujuh Prinsip Etika Kristiani dalam Kehidupan Berbangsa**

Apa yang dimaksud dengan semangat Injili? Kita dapat mengatakan, bahwa semangat Injil terdiri atas tiga sikap dasar : Semangat cinta kasih, Hormat terhadap martabat manusia (setiap orang sebagai anak tercinta Allah) dan Solidaritas dengan orang - orang miskin dan lemah. Semangat Injili dalam tiga arah perwujudan ini mengikat politisi Kristiani. Maka politisi Kristiani tidak memberikan ruang kepada kebencian dan balas dendam. Ia tidak pernah memperalat orang lain. Ia menolak pembangunan yang dibayar dengan mengorbankan orang-orang kecil, penduduk lokal, perempuan dan lain - lain. Dan ia berada di pihak orang-orang kecil, ikut membela hak - hak mereka, ikut memperjuangkan kepentingan mereka, menuntut agar mereka diberikan perhatian khusus. Tiga semangat itulah ciri pengikut Kristus dalam kehidupan sosial politik semua bangsa dimana ada umat Kristiani.

Yang penting adalah bagaimana menerjemahkan semangat Injil itu kedalam bahasa politik. Orang Kristiani ikut dalam kehidupan politik, tidak berarti bahwa mereka selalu sependapat. Bisa saja orang Kristen menganut kebijakan politik yang berbeda. Tidak ada monopoli kebijakan politik. Maka perbedaan pandangan politik dalam umat Kristiani wajar-wajar saja. Akan tetapi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 111

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 111

dimana kita tidak boleh berbeda adalah dalam semangat Injili tadi. Dalam ajaran Gereja sekarang ini, semangat Injili dikonkretkan dalam beberapa prinsip-prinsip etika Kristiani. Maka perbedaan dalam kebijakan konkret diantara orang Kristiani harus tetap berdasarkan cita-cita dasar yang sama dan perjuangan mereka tetap atas dasar landasan prinsip-prinsip itu.

Manakah prinsip-prinsip itu? Tidak ada prinsip-prinsip yang sama sekali baku. Namun tujuh prinsip<sup>22</sup> berikut sekurang-kurangnya dapat membantu dalam segala perjuangan politik.

1) **Prinsip kebaikan hati.** Sikap baik hati terhadap siapapun, kawan maupun lawan, adalah tuntutan dasar Yesus pada para pengikutnya. Begitu pula tujuan segala pembangunan adalah keadilan, kebahagiaan, kebebasan dan perdamaian bersama bertambah. Dalam kehidupan politikpun orang Kristiani akan menunjukkan kesediaan untuk memaafkan, berdamai, untuk menghormati lawan.

2) **Berpihak pada kehidupan.** Orang Kristiani tidak memakai kematian sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, orang Kristiani menolak abortus dan pembunuhan janin demi tujuan penelitian. Demikian pula orang Kristiani menolak pembunuhan – pengrusakan demi mencapai tujuan pemenangan politisnya.

3) Prinsip paling umum Ajaran Sosial Gereja adalah prinsip **Kesejahteraan Umum (bonum commune)**. Yang dimaksud adalah, negarawan dan politisi, baik di level nasional maupun lokal, ditugasi untuk mengusahakan kepentingan umum dan bukan kelompok/ diri sendiri. Negarapun bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan diciptakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Negara adalah untuk manusia, bukan manusia untuk negara. Maka politisi Kristiani akan selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi juga dari pada kepentingan golongannya atau kepentingan partainya. Dalam prinsip itu langsung terimplikasi, bahwa politisi Kristiani tidak ikut korupsi (waktu, uang, tenaga). Politisi Kristiani berpolitik demi kesejahteraan masyarakat dan tidak memakai kesempatan, yang barangkali ada, untuk secara sah memperkaya diri.

4) **Prinsip Subsidiaritas.** Prinsip ini mengatakan, bahwa lembaga lebih tinggi wajib membantu lembaga-lembaga lebih rendah, pabila mereka tidak dapat sendiri menyelesaikan keperluan - keperluan mereka. Dan dari sudut terbalik, tugas - tugas yang dapat diselesaikan memuaskan oleh lembaga - lembaga lebih rendah, tidak boleh diambil alih oleh lembaga lebih tinggi. Prinsip itulah yang menjadi latar belakang "Otonomi Daerah". Apa yang dapat dikerjakan Propinsi, jangan ditarik ke Pusat oleh Pemerintah Nasional. Dan apa yang dapat diselsaikan di tingkat kelurahan, bukan urusan Bupati.

5) **Prinsip Solidaritas.** Prinsip ini menegaskan, bahwa dalam pembangunan semua harus sama beruntung dan sama berkorban, senasib sepenanggungan. Solidaritas berarti, bahwa yang lemah, miskin dan tak berdaya harus didahulukan (*preferential option for the poor*). Solidaritas bangsa kelihatan dalam bagaimana bangsa itu memperlakukan anggota-anggotanya yang "kurang berarti". Prinsip solidaritas juga memuat tuntutan, bahwa perwujudan keadilan sosial menjadi tujuan pertama pembangunan. Dewasa ini solidaritas harus menjangkau juga generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu manusia wajib menjaga keutuhan lingkungan hidup agar generasi-generasi mendatang menemukan bumi yang masih pantas dihuni.

---

<sup>22</sup> Franz Magnis Suseno, Iman dan Hati Nurani, Jakarta: Obor, 2014, hlm 132-136



6) **Menjunjung tinggi martabat manusia**, yang diciptakan menurut citra Allah dan dipanggil menjadi anak Nya yang tercinta, menjadi nyata dalam prinsip hormat terhadap hak asasi manusia. Gereja Katolik misalnya secara resmi mengakui hak asasi manusia sebagai terjemahan sikap yang mau menghormati martabat manusia ke dalam kenyataan kehidupan sosial politik. Maka politisi, dan tentu segenap umat Katolik, membela hak-hak dasar manusia. Begitu pula umat Kristen, hendaknya mendukung hak dan kewajiban masyarakat untuk ikut menentukan nasib bangsa, atau dengan kata lain perwujudan kehidupan yang demokratis. Terutama hak-hak asasi manusia inti tidak pernah boleh kita langgar dan tidak pernah boleh kita biarkan pelanggaran terjadi. Disitu termasuk larangan terhadap pembunuhan sewenang - wenang, terhadap penggunaan sistematis penyiksaan (torture), baik fisik maupun psikis, terhadap hukuman kejam dan bengis, terhadap segenap pengekangan kebebasan beragama dan kepercayaan menurut iman atau keyakinannya, terhadap penangkapan sewenang-wenang, perbudakan, perdagangan orang (wanita, anak dibawah umur), pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penghancuran basis kehidupan para penduduk dalam wilayah yang ada masalah keamanan, terhadap penindasan berbentuk ganosid, pemerkosaan hak minoritas-minoritas etnik, agama atau budaya atas budaya, bahasa, agama dan atas otonomi terbatas berdasarkan adat istiadat.

7) **Prinsip penolakan kekerasan**. Dalam mengusahakan sasaran - sasaran, termasuk yang baik, kita tidak memakai kekerasan. Masalah-masalah dan konflik-konflik yang muncul wajib dipecahkan secara damai. Pemakaian ancaman, pemerasan dan paksaan untuk mencapai tujuan – tujuan pembangunan harus ditolak.

## **Penutup**

Kalau itu semua mau dirangkum kita bisa pendek: Gereja haruslah tetap memberikan warna dalam perpolitikan di Indonesia dengan terus memberikan inspirasi di tengah-tengah masyarakat, namun gereja tidaklah terjun dalam politik praktis (partai-partai). Dan untuk warga jemaat awam yang ingin terjun dalam dunia politik haruslah tetap memegang ketujuh prinsip etika politik Kristiani. Sehingga ketujuh prinsip etika Kristiani tersebut menjadi kriteria untuk menilai ideologi-ideologi politik lainnya. Sehingga politisi Kristiani mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Point yang terpenting bagi politisi Kristiani jugalah harus memperjuangkan Pancasila.

## Daftar Pustaka

- Soedarmo, R, Kamus Istilah Teologi, Jakarta: BPK Gunung Mulia 2002.
- Niftrik, Van G.C dan Boland, B.J, Dogmatika Masa Kini, Jakarta: BPK Gunung Mulia 2001.
- Lugo, Gunche, Manifesto Politik Yesus, Yogyakarta: Andi 2009.
- Rodee, Carlton Clymer dkk, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: PT Garafindo Persada 2000.
- Singgih, Emanuel Gerrit, Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia, Jakarta: BPK Gunung Mulia 2000.
- Sairin, Weinata dan Pattiasina, J.M, Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta: BPK Gunung Mulia 1996.
- Suseno, Franz Magnis, Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk, Jakarta: Obor 2004.
- Suseno, Franz Magnis, Iman dan Hati Nurani, Jakarta: Obor 2014.
- Sinaga, Martin L. (peny), Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia, Teks-Teks Terpilih Eka Damaputra, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ngelow, Zakaria J, Pengalaman Kristen dalam Hubungan Agama dan Negara, Pointers pada seminar Gereja dan Isu-Isu Agama.
- Yewangoe, Andreas A, Agama dan Negara: Sebuah Hubungan Yang Tidak Mudah, Disampaikan Dalam Kursus "Pendidikan Politik Angkatan III" di Palangkaraya, 20 Oktober 2008
- Menoh, Gusti A.B, Relasi Gereja dan Negara, Tomoe Express Harian Kupang, Agustus 2014.
- <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/02/10/ketua-umum-gereja-pentakosta-capres-harus-berlatar-tni>